



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KELIMUTU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KELIMUTU TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 – 2026

3. Perencanaan.....

3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Kelimutu adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Kecamatan adalah Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende
25. Camat adalah camat Kelimutu Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Kelimutu disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kelimutu adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Kelimutu yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

C. Sebagai.....

- c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Kelimutu khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kelimutu sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Kelimutu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV RENJA KECAMATAN KELIMUTU

Pasal 5

- (1) Renja Kecamatan Kelimutu memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Kelimutu yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENJA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renja Kecamatan Kelimutu melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Kelimutu dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Kelimutu selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renja kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renja hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renja Kecamatan Kelimutu kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Kelimutu.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kelimutu.

(2). Pengendalian....

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

- a. kebijakan Perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Kelimutu meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan Kelimutu meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat Kecamatan/Sub Bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kelimutu.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renja Kecamatan.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renja Kecamatan Kelimutu dapat diubah dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. Merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renja Kecamatan Kelimutu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renja dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB. VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

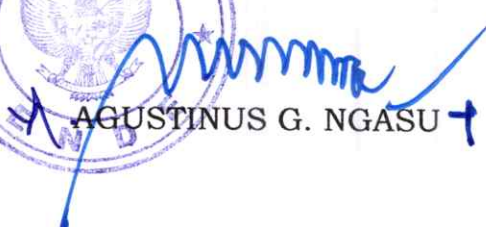
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 38, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE, 

AGUSTINUS G. NGASU 

Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE 


EFREM DIAKON AINA 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 127

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Tahun 2019-2024.

Semoga Renja yang disusun ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh aparatur Kecamatan Kelimutu dalam upaya membangun masyarakat Kecamatan Kelimutu melalui penguatan koordinasi, pembinaan dan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiba masyarakat di Wilayah Kecamatan.


KECAMATAN KELIMUTU
JOSEF DAVID SARI, SE
PEMBINA TK. I
NIP: 197303182000031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KELIMUTU TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun Berkenan (2024) serta Capaian Renstra Kecamatan Kelimutu Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelimutu
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kelimutu
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kelimutu
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KELIMUTU

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Pendanaan Kecamatan Kelimutu

BAB V

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kelimutu 2019 s/d 2024

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende

Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Tabel. 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 127 / KEP / HK / 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Ende Tahun 20025-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan. Tahap dalam perencanaan pembangunan terdiri dari:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Dari keempat aspek tersebut menghasilkan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu merupakan rencana tahunan (rencana jangka pendek) sebagai penjabaran rencana jangka menengah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (*guide line*) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024 dimana Kabupaten Ende merupakan salah satu daerah yang dimaksud menerangkan bahwa Daerah tersebut tetap

membutuhkan dokumen rencana pembangunan sambil menunggu RPJMD pasca terpilihnya Kepala Daerah yang baru pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Kepala Daerah yang RPJMD berakhir tahun 2024 untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Kelimutu tahun 2025-2026 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan Kelimutu tahun 2025-2026 dimana tiap tahunnya akan disusun rencana kerja (renja) Kecamatan Kelimutu

Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu tahun 2025 selain merupakan pedoman bagi Kecamatan Kelimutu dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 juga sebagai alat untuk menjamin kesesuaian antara matrik program dan kegiatan pada renja dengan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 serta alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana kerja Kecamatan Kelimutu disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan yang baik, handal, dan prima melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Kelimutu

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ende 2005-2025;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu adalah untuk menetapkan arah dan pedoman bagi Kecamatan Kelimutu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju serta lokasi yang telah ditetapkan

1.4 PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat tentang :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 serta capaian Renstra sampai dengan tahun 2025.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai
- 2.5 Penelaahan Terhadap Kegiatan Yang Diusulkan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KELIMUTU

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Penjelasan tentang :

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan renja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KELIMUTU TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun Berkenaan (2024) serta Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025

Kecamatan Kelimutu Tahun 2024 secara umum telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi serta mampu memenuhi target kinerja organisasi. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kinerja Pemerintah Kecamatan Kelimutu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ kegiatan/sub kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Secara garis besar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang merupakan keberlanjutan dan aktualisasi program-program pemerintah kabupaten sesuai pendelegasian kewenangan kepada kecamatan sehingga evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kecamatan Kelimutu Tahun 2024 dan perkiraan tahun berjalan 2025 yang kesemuanya ini mengacu pada Renstra Kecamatan Kelimutu Tahun 2025-2026 dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kelimutu 2019 s/d 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	14				KECAMATAN		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100,00%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100,00%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	98,74%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14 Org/bln	17/14 Orang/bulan	17/14 Org/bln	17/14 Org/bln	100%	17/14 Org/bln	51/42 Org/bln	94,95%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17/14 Org/bln	17/14 Org/bln	17/14 Org/bln	17/14 Org/bln	100%	17/14 Org/bln	51/42 Org/bln	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	100,00%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100,00%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	18 Laporan	100,00%
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
7	01	01	2.03	05	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	18 Laporan	100,00%
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	18 Laporan	100,00%

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	72,97%
7	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	100,00%
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	30 Paket	100,00%
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	51 Unit	100,00%
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	51 Dokumen	95,94%
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	-1 Orang	0 Orang	-	1- Orang	3 Orang	50,00%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	93,24%
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	100,00%
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1- Paket	3 Paket	52,17%
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-1 Paket	-1 Paket	100%	1- Paket	3 Paket	100,00%
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100,00%
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2- Dokumen	2- Dokumen	100%	2- Dokumen	6 Dokumen	100,00%
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	93,75%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100,00%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	59,87%
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%-	2- Unit	6 Unit	100,00%
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3- Unit	3- Unit	-100%	3 -3 Unit	9 Unit	50,00%
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-3 Unit	-3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	89,47%
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-100%-	3- Unit	9 Unit	0,00%
7	01	01	2,07	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-100%	3- Unit	9 Unit	100,00%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	Persen Persen	100 Persen	100,00%
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100,00%
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12- Laporan	12- Laporan	--100%	12- Laporan	36 Laporan	76,64%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	Persen Persen	100 Persen	53,06%
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	72,92%
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	--100%	5 Unit	15 Unit	63,64%
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	--100%	3 Unit	9 Unit	70,00%
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-100%	3 Unit	9 Unit	100,00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100,00%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	Laporan	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Laporan	100,00%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Laporan	100,00%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100,00%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Laporan	100,00%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	-100%	100	Persen	100	Persen	77,66%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi kegiatan Pemberdayaan desa	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,00%	100	Persen	100	Persen	74,23%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	83%	6	Lembaga Kemasyarakatan	18	Lembaga Kemasyarakatan	83%
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	1	Unit	-1	Unit	-1	Unit	--100%	1	Unit	3	Unit	100,00%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Pokmas / Ormas	100,00%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100,00%
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	100%	6	Lembaga Kemasyarakatan	60	Lembaga Kemasyarakatan	100,00%
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	-100%	6	Lembaga Kemasyarakatan	18	Lembaga Kemasyarakatan	100,00%
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	-100%	5	Laporan	15	Laporan	100,00%
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	58,75%
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	40%	1	Dokumen	3	Dokumen	85,00%
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1-	Dokumen	1-	Dokumen	-100%	1	Dokumen	3	Dokumen	50,00%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100,00%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100,00%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	-100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100,00%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	10	Laporan	83%	12	Laporan	36	Laporan	83%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90 Laporan	100,00%
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90 Orang	100,00%
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	100,00%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
7	01	06	2.01	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	14	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	100,00%

2.2. Analisis kinerja Pelayanan Kecamatan Kelimutu

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kelimutu dilakukan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Kelimutu Tahun 2019-2024 sedangkan tolok ukur SPM dan indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Kelimutu belum ditetapkan indikator pelayanannya yang disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Kecamatan Kelimutu				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik.				100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
2	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan di Tingkat Kecamatan (Renstra, Renja, RKA, DPA dan Rencana Kegiatan Tahunan)	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
4	Prosentase ketersediaan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang terselesaikan tepat waktu (LKJ-IP, LPPD, LKPJ, SPJ, Laporan Keuangan, Data Aset, Laporan Bulanan dan Laporan Perkembangan Penduduk)	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
4	Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik.	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
5	Prosentase Jumlah Desa yang memiliki Kelembagaan yang aktif (BPD, LPM, PKK, Kader Posyandu, KPM, Karang Taruna, dan Kelembagaan Adat)	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
6	Prosentase kehadiran dan Partisipasi Masyarakat	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

	dalam kegiatan Musdes											
7	Prosentase jumlah desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan dengan baik dan tepat waktu (RPJMDes, RKPDesa dan APBDes)	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Prosentase jumlah desa yang mampu menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan tepat waktu (Realisasi PBB, LKPPD, LKPJ, SPJ, Laporan Penduduk)				100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
8	Prosentase jumlah desa yang memiliki Bumdes aktif.	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kelimutu

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Sejalan dengan isu global, nasional, provinsi NTT dan Kabupaten Ende serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ende pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;

- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Namun Kecamatan Kelimutu belum melaksanakannya karena belum memiliki persyaratan yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis. Persyaratan substantif yang belum dipenuhi yaitu belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Ende di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga belum dipenuhi dengan belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana termasuk SPP pada tingkat Desa. Selanjutnya persyaratan teknis yang belum dipenuhi yaitu belum adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun Desa telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsos sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perbup pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat

kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa se Kecamatan Kelimutu bersifat non fisik. Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kelimutu yang terdiri dari 9 (Sembilan) Desa. Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan dan Desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat, pembangunan sarana prasarana Desa dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaanya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan

3. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Kelimutu. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat

4. Stunting

Stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi di Indonesia. Upaya percepatan penurunan prevelansi stunting menjadi salah satu dari proyek prioritas dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting masuk dalam major 2021 dalam RPJMN 2020-2024. Upaya penurunan stunting di Kabupaten Ende dilakukan berdasarkan intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (non kesehatan). Penyelenggaraannya secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting yang juga tidak hanya melibatkan perangkat daerah tetapi juga lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan lembaga lainnya

2.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Adalah hal yang wajar bila kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki perlu dilakukan untuk merumuskan kebijakan umum anggaran berdasarkan pertimbangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten / kota.

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Rencana Program kegiatan Pemerintah Kecamatan Kelimutu untuk Tahun 2023 tidak mengalami perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan atas pertimbangan kondisi riil kebutuhan organisasi serta bertujuan untuk meningkatkan daya dukung terhadap pelaksanaan tupoksi kecamatan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal, termasuk dalam hal penganggaran.

Gambaran mengenai review terhadap rancangan awal RKPD dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00	KECAMATAN				1.638.407.014	KECAMATAN				1.638.407.014
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kelimutu	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1.463.907.014	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kelimutu	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1.463.907.014
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	19.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	19.300.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.300.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	2.000.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.230.441.764	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.230.441.764
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bul	1.212.941.764	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bul	1.212.941.764

1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	2.500.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2.500.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.500.000
1.3.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.500.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	17.644.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	17.644.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17 Paket	1.694.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17 Paket	1.694.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	2.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	2.500.000
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	3.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	3.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	7.950.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	7.950.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	45.467.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	45.467.600
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.547.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.547.100

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.985.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.985.500
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.935.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.935.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.000.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	76.952.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	76.952.600
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	36.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	36.000.000,00
	Pengadaan Mebel	3 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	10.000.000
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.952.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.952.600
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21.647.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21.647.700
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.147.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.147.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.500.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	49.953.350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kelimutu	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	49.953.350

1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4.850.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4.850.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	24.005.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	24.005.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1.683.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1.683.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kelimutu	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	22.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kelimutu	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	22.000.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	20.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	20.000.000
2.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu		100 %	20.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu		100 %	20.000.000
2.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Pras	12 Dokumen	20.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Pras	12 Laporan	20.000.000
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	2.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100 %	20.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100 %	20.000.000
2.3.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kelimutu	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	30.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kelimutu	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	30.000.000
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kelimutu	Persentase kordinasi kegiatan Pemberdayaan desa	100 %	10.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kelimutu	Persentase kordinasi kegiatan Pemberdayaan desa	100 %	10.500.000

2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2.500.000
3.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Baik	100 %	12.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Baik	100 %	12.000.000
3.1.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000
2.3.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000
2.3.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3.500.000
2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	7.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	7.500.000
2.5.1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	5 Dokumen	4.000.000	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	5 Dokumen	4.000.000
2.5.3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	4 Dokumen	3.500.000	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	4 Dokumen	3.500.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kelimutu	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100 %	30.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kelimutu	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100 %	30.000.000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100 %	20.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100 %	20.000.000
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Toko Masyarakat	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Toko Masyarakat	1 Laporan	10.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Toko Masyarakat	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Toko Masyarakat	1 Laporan	10.000.000
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik	100 %	10.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik	100 %	10.000.000

4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kelimutu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	10.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kelimutu	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	33.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kelimutu	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	33.000.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik	100 %	33.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kelimutu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik	100 %	33.000.000
Jumlah						Jumlah				

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut diatas dapat diketahui jumlah pagu anggaran indikatif Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 baik pada awal perencanaan maupun hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp. 1.638.407.014

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ende Tahun 2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende ditetapkan Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan guna mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Ende melalui RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2026 maka proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat sehingga setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif oleh karena itu Kecamatan Kelimutu telah melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaannya. Pada proses pelibatan tersebut bertujuan agar aspirasi dan kepentingan masyarakat terakomodasi di dalam setiap kebijakan baik pada level Kecamatan, perangkat daerah lainnya maupun kebijakan Kepala Daerah. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketujuh yaitu Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik sedangkan terdapat 8 arah kebijakan tahun 2024 yang tema RKP nasional adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang terdiri dari

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. Arah kebijakan ketiga yakni penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (decent job)
4. mendorong pemulihan dunia usaha
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan terutama untuk hilirisasi
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kelimutu tidak terlibat secara langsung dalam mendukung 8 arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 sehingga Kecamatan Kelimutu sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan 8 arah kebijakan pembangunan nasional tersebut termasuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Kelimutu yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditetapkankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK sesuai dengan isu strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur "Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi". Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Kelimutu adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Kelimutu diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Rencana Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klafikasi program dan kegiatan Kecamatan Kelimutu. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Ende.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kelimutu Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga,
- 2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya,
- 3) Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
- 4) Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya,
- 5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kelimutu

3.2.1 Tujuan Renja

Dalam rangka mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Ende yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kecamatan yang lebih operasional dan dituangkan dalam Renja Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende Tahun 2025. Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan Kelimutu adalah sebagai berikut :

Tujuan Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende yang merupakan penjabaran dari misi kelima RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2026, sasaran kesatu pada tujuan kesatu yaitu Meningkatkan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Baik.

setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program strategis

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kelimutu maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KELIMUTU KAB. ENDE
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KELIMUTU						1.601.859.914,00							1.729.941.764,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.601.859.914,00							1.729.941.764,00	
	7.01	KECAMATAN						1.601.859.914,00							1.729.941.764,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.427.359.914,00						-	1.513.941.764,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	19.300.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	23.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			8 Dokumen	7.300.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan			4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	9 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	9 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	1.230.441.764,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	1.233.441.764,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan			17 Orang/bulan	1.212.941.764,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	17 Orang/bulan	1.213.941.764,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit			2 Unit	2.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	3.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket			0 Paket	1.694.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	17 Paket	3.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			17 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			17 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang			1 Orang	7.950.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Orang	30.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Parsed			-	44.920.500,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Parsed	54.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			5 Unit	4.850.500,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	24.005.400,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	26.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	1.683.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	42.000.000,00						-	63.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 Persen			-	22.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	41.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan			12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	20.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Dokumen	21.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	100 Persen			-	20.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	22.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen			12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Dokumen	22.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	30.000.000,00						-	36.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 Persen			-	10.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	12.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen			1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	30.000.000,00						-	31.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 Persen			-	20.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	21.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Laporan	10.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-		10.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 Persen			-	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	10.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Laporan	10.500.000,00	KECAMATAN KELIMUTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	33.000.000,00						-	39.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 Persen			-	33.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	39.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang			30 Orang	7.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	30 Orang	12.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang			30 Orang	8.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	30 Orang	9.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan			5 Laporan	8.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	5 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	2.500.000,00	Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-		3.000.000,00	KECAMATAN KELIMUTU
			JUMLAH					1.601.859.914,00							1.729.941.764,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan skenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kelimutu

pada tahun 2025 yang diawali dari tahap persiapan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan (Desember 2023)

- Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kelimutu Tahun 2025
- Setelah penetapan Renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Kecamatan Kelimutu sebagai bahan Rancangan APBD 2025;
- Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan;
- Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan);
- Persiapan proses pengadaan barang/jasa.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2024

c. Tahap Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende;
- Pengendalian dan evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun Pendanaan Perangkat Daerah melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kelimutu sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2025 semuanya berasal dari APBD Kabupaten Ende sebesar Rp. 1.601.859.914,00,-

BAB V

PENUTUP

4.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 merupakan acuan bagi pegawai dilingkungan pemerintah Kecamatan Kelimutu sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seksi-Seksi maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat serta pegawai/karyawan yang ada dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kelimutu berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Seksi-Seksi, maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan Kelimutu perlu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja tahun 2025 sebagai berikut :
 1. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 2. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Selain itu masyarakat luas dapat juga berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
 4. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap seksi dan kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan Kelimutu wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Kecamatan Kelimutu menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kelimutu Tahun 2025 yang menjelaskan :

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2025 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi.
2. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah.
3. Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2025 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah Kecamatan Kelimutu akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Kelimutu perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Pj. BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU